BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 142 /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah perlu ditetapkan status penggunaan barang milik daerah oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam hal barang milik daerah berada pada tanah dan/atau bangunan dalam penguasaan Pengguna Barang, maka barang milik daerah tersebut dicatat dalam Daftar Barang Milik Pengguna dimana tanah dan/atau bangunan tersebut, kecuali ditentukan sebagaimana diktum Kesatu di atas;

KETIGA : Mutasi barang milik daerah antar organisasi perangkat daerah (OPD) setelah penetapan ini, dapat dilaksanakan dengan disertai berita acara serah terima antar OPD serta dilaporakan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	B. Perlengkapan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 142 /KPTS/IV.01/2019
TANGGAL : 21 jan. JANUARI 2019

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	DAFTAR BARANG MILIK DAERAH	OPD	KETERANGAN
1.	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Kabupaten	Inspektorat Kabupaten	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Inspektorat
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 BPKD
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Bappeda
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Badan Penelitian dan Pengembangan
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 BPBD
9.	Kantor Kesbang dan Politik	Kantor Kesbang dan Politik	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Kesbangpol
10.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

OPD KABAG HUKUM

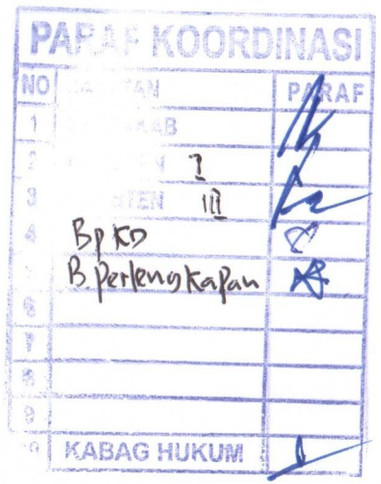
11.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Dinas Kesehatan
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Dinas PU dan PERA
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Disdukcapil
14.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
15.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Diskoperindagsar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Satpol PP
18.	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Dinas Ketahanan Pangan
19.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
20.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Dinas Perkebunan dan Peternakan
21.	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Dinas Perikanan
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Dinas PMP
23.	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Dinas Lingkungan Hidup
24.	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja

OPD | KABAG HUKUM

25.	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Dinas Sosial
26.	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Dishub
27.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Diskominfo
28.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29.	RSUD Alimuddin Umar	RSUD Alimuddin Umar	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 RSUD Alimuddin Umar
30.	Kecamatan Balik Bukit	Kecamatan Balik Bukit	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Kec Balik Bukit
31.	Kecamatan Belalau	Kecamatan Belalau	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Kec Belalau
32.	Kecamatan Sumber Jaya	Kecamatan Sumber Jaya	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Kec Sumber Jaya
33.	Kecamatan Way Tenong	Kecamatan Way Tenong	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Kec Way Tenong
34.	Kecamatan Sekincau	Kecamatan Sekincau	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Kec Sekincau
35.	Kecamatan Suoh	Kecamatan Suoh	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Kec Suoh
36.	Kecamatan Batu Brak	Kecamatan Batu Brak	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Kec Batu Brak
37.	Kecamatan Sukau	Kecamatan Sukau	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Kec Sukau
38.	Kecamatan Gedung Surian	Kecamatan Gedung Surian	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Kec Gedung Surian
39.	Kecamatan Kebun Tebu	Kecamatan Kebun Tebu	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Kec Kebun Tebu,
40.	Kecamatan Air Hitam	Kecamatan Air Hitam	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Kec Air Hitam

OPD KABAG HUKUM

41.	Kecamatan Pagar Dewa	Kecamatan Pagar Dewa	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Kec Pagar Dewa
42.	Kecamatan Batu Ketulis	Kecamatan Batu Ketulis	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Kec Batu Ketulis
43.	Kecamatan Bandar Negeri Souh	Kecamatan Bandar Negeri Souh	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Kec Bandarnegeri Souh
44.	Kecamatan Lumbok Seminung	Kecamatan Lumbok Seminung	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2018 Kec Lumbok Seminung



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.01/2019
TANGGAL : JANUARI 2019

PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA BUPATI LAMPUNG BARAT

NO.	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KUANTITAS	HARGA PEROLEHAN (Rp)	OPD ASAL	OPD PENERIMA	KETERANGAN
1.	GEDUNG KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KECAMATAN KEBUNTEBU	2018	1 UNIT	693.969.000,-	DINAS PUPR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	MUTASI ANTAR OPD
2.	RUMAH DINAS BUPATI	2018	1 UNIT	1.989.258.000,-	DINAS PUPR	SEKRETARIAT DAERAH	MUTASI ANTAR OPD
3.	RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	2018	1 UNIT	595.592.000,-	DINAS PUPR	SEKRETARIAT DAERAH	MUTASI ANTAR OPD
4.	DRAINASE JALAN LINGKAR KELURAHAN TUGUSARI	2018	1 UNIT	947.315.000,-	DINAS PUPR	DINAS PUPR	PEMBANGUNAN
5.	POS JAGA	2017	1 UNIT	72.376.294,-	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	MUTASI ANTAR OPD
6.	DRAINASE PURAJAYA	2018	1 UNIT	297.073.000,-	DINAS PUPR	DINAS PUPR	PEMBANGUNAN
7.	BRONJONG MASJID HANAKAU	2018	1 UNIT	395.464.000,-	DINAS PUPR	DINAS PUPR	PEMBANGUNAN
8.	BRONJONG SMPN 2 SUMBERJAYA	2018	1 UNIT	296.983.000,-	DINAS PUPR	DINAS PUPR	PEMBANGUNAN
9.	BRONJONG PONPES AL HASYMIYAH SUMBERALAM AIRHITAM	2018	1 UNIT	298.248.000,-	DINAS PUPR	DINAS PUPR	PEMBANGUNAN
10.	SPAM PERDESAAN PEKON MEKARJAYA GEDUNGSURIAN	2018	1 UNIT	1.891.126.000,-	DINAS PUPR	DINAS PUPR	PEMBANGUNAN
11.	PRASARANA PENDAMPING KEBUN RAYA LIWA	2018	1 UNIT	1.279.518.000	DINAS PUPR	BADAN LITBANG	MUTASI ANTAR OPD
12.	PRASARANA PENDAMPING KEBUN RAYA LIWA	2018	1 UNIT	212.483.000	DINAS PUPR	BADAN LITBANG	MUTASI ANTAR OPD

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BPKD	
5	B. Perlengkapan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS